

**Analisis Laporan Keuangan Dana Desa Pada Kampung Sri Sawahan
Kecamatan Punggur**

Nani Septiana¹, Deny Edy Widodo², Muhammad Rafli³

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia

Email: mrafli12900@gmail.com

Abstrak

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau organisasi yang di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan dana desa yang bertujuan untuk menilai kinerja aparatur pemerintah desa dengan menggunakan laporan pendapatan dan belanja desa pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Pada penelitian ini rasio yang digunakan yaitu rasio kemandirian daerah dan rasio efesiensi belanja daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah Kampung Sri Sawahan, Kecamatan Punggur. Data pada penelitian ini menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Hasil dari penelitian adalah kinerja pemerintah Kampung Sri Sawahan pada rasio kemandirian daerah pada tahun 2020 dan 2021 sangat lah rendah. Dan pada rasio efesiensi belanja daerah juga menunjukkan hasil kurang efesiensi.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Kemandirian Daerah, Efesiensi Belanja Daerah

Abstract

Financial statements are information that describes the condition of a company or organization which will then become information that describes the performance of a company or organization. This research was conducted to analyze the financial reports of village funds with the aim of assessing the performance of village government apparatus using village income and expenditure reports in the 2020 and 2021 fiscal years. In this study the ratios used were the regional independence ratio and the regional spending efficiency ratio. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The object of this research is Sri Sawahan Village, Punggur District. The data in this study used village revenue and expenditure budget data (APBDes) in the 2020 and 2021 fiscal years. The results of the research are that the performance of the government of Kampung Sri Sawahan in terms of regional independence ratio in 2020 and 2021 is very low. And the regional spending efficiency ratio also shows less efficient results.

Keywords: Financial Reports, Regional Independence, Regional Spending Efficiency

I. PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem pemerintahan suatu negara khususnya negara Indonesia dan dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana untuk

mendukung segala kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 72 UU No. 6 TAHUN 2014. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan, yaitu berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 pengertian Dana Desa sendiri adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap tahunnya sejak tahun 2015 khususnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar dan dana tersebut meningkat setiap tahunnya. Untuk total jumlah Anggaran dana desa di Kampung Sri Sawahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Informasi Alokasi Dana Desa di Kampung Sri Sawahan 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Anggaran (RP)
1.	2017	774.974.743
2.	2018	738.983.340
3.	2019	856.567.852
4.	2020	874.321.000
5.	2021	886.743.000

Sumber: Alokasi Dana Desa Di Kampung Sri Sawahan Tahun Anggaran 2017-2021

Dari tabel 1. Di atas penulis dapat melihat bahwa jumlah penerimaan dana desa di Kampung Sri Sawahan yang diterima setiap tahunnya sejak tahun 2017-2021 cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya (Rafli, 2022). Namun pada penerapannya alokasi dana desa memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya alokasi dana yang besar akan mampu membantu dalam pembangunan desa. Seperti data dari KEMENKEU selama periode tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa telah banyak sekali menghasilkan beragam capaian *output* berupa infrastruktur yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup bagi masyarakat desa. Seperti jalan desa sepanjang 261.877 km, jembatan sepanjang 1.494.804 meter, pasar desa sebanyak 11.944 unit, BUMDES sebanyak 39.844 kegiatan, tambatan perahu sebanyak 7.007 unit, embung sebanyak 5.202 unit, irigasi sebanyak 76.453 unit, dan sarana olahraga sebanyak 27.753 unit. Sedangkan dampak negatifnya alokasi dana yang besar akan menimbulkan potensi korupsi yang besar pula dikarenakan sumber daya manajemen pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah desa yang masih belum baik, ditambah dengan proses pengawasan transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah oleh pemerintah daerah. Bahkan sejak pertama kali dana desa dianggarkan pada tahun 2015 hingga saat ini tidak sedikit penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Pengaruh besar yang dimiliki aparatur desa terutama kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa cenderung mengakibatkan korupsi. Persoalan ini berhubungan dengan lemahnya fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Akibatnya kepala desa dan aparatur merasa bebas dalam mengelola Dana Desa. Selain itu juga terdapat dua potensi persoalan aspek pengawasan, yakni analisis inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan ADD desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik (Suwanto & Japlani, 2021). Bahkan menurut KPK korupsi dana desa masuk ke dalam 3 besar kasus terbanyak dalam korupsi pengelolaan keuangan dengan adanya 601 kasus korupsi melibatkan 686 tersangka berasal dari aparat desa.

Transparansi sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Wujud transparansi salah satunya dalam bentuk pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan (Febriyanto : 2022). Transparansi dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat dengan keterbukaan informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa dapat membuat masyarakat desa percaya dengan aparatur desa. Sebagai masyarakat desa seharusnya memiliki kewajiban untuk mengetahui baik tidaknya penggunaan dana desa (Septiana, 2022). Selain itu masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana sikap perilaku dari aparatur desa hal itu dibutuhkan untuk menilai kinerja dari aparatur desa. Kini kebanyakan Desa-desa memiliki persoalan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini disebabkan dari minimnya akses keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Masyarakat terkesan menjadi masa bodo terhadap pemerintah desa, karena sebagian dari mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pada saat musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah desa (MUSDES).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan data kuantitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. metode deskriptif analisis menurut Moh. Nazir adalah Penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.

A. Subjek Penelitian

Subjek merupakan target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Menurut Sugiono (2014 : 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diharapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasi sebagaimana sebagai pelaksana tugas pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Sri sawahan Kecamatan Pungkur Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari data di lapangan atau dari sumber aslinya. Data yang dimaksud adalah hasil dari wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang menjadi objek penelitian peneliti maupun hasil dari observasi suatu objek Peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer untuk penelitian ini. Data sekunder merupakan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian atau sumber data yang diperoleh berasal dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, dan arsip serta laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

1. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Observasi dilakukan secara mendalam dengan melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung yaitu instansi terkait pada pihak kelurahan setempat. Selain itu juga dilakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran – gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Kepala desa dan Kaur Keuangan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan berupa foto atau dokumen elektronik (Rekaman).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari sebuah permasalahan atau dapat juga diartikan sebagai penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

2. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Standar akuntansi pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (Mahmudi: 2016). Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Deskripsi Data

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sri Sawahan

Tabel 2. Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sri Sawahan Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN
----	--------	----------

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	PENDAPATAN	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	2.300.000,00
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2.300.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.277.909.705,00
1.2.1.	Dana Desa	874.321.000,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.599.109,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	380.989.696,00
	JUMLAH	<u>1.280.209.705,00</u>
2.	BELANJA	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	555.598.750,00
2.1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	507.864.000,00
2.1.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	30.350.000,00
2.1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.738.000,00
2.1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.646.750,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	273.205.500,00
2.2.1.	Sub bidang Pendidikan	22.180.000,00
2.2.2.	Sub Bidang Kesehatan	35.663.500,00
2.2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	213.363.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	15.824.500,00
2.3.1.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.200.000,00
2.3.2.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.624.500,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.277.500,00
2.4.1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.277.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	398.300.000,00
2.5.1.	Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000,00
2.5.2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	348.300.000,00
	JUMLAH BELANJA	<u>1.246.206.250,00</u>
	SURPLUS / (DEFISIT)	<u>34.003.455,00</u>
3.	PEMBIAYAAN	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.059.446,00
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	11.059.446,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	<u>(33.940.554,00)</u>
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	<u>62.901,00</u>

Sumber: Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2020

Dari Tabel 2 merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kampung Sri Sawahan tahun anggaran 2020 dan dapat kita lihat bahwa jumlah total

pendapatan Kampung Sri Sawahan pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar **Rp. 1.280.209.705,00**. Dan dalam pembelanjaan anggaran tersebut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan pembiayaan yang terbesar yaitu berjumlah **Rp. 555.598.750,00**.

Tabel 3. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sri Sawahan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	PENDAPATAN	
1.1.	Pendapatan Transfer	1.295.378.862,00
	JUMLAH	<u>1.295.378.862,00</u>
2.	BELANJA	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	590.063.250,00
2.1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	540.804.000,00
2.1.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	10.500.000,00
2.1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.700.000,00
2.1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.059.250,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	363.986.000,00
2.2.1.	Sub Bidang Pendidikan	15.200.000,00
2.2.2.	Sub Bidang Kesehatan	90.095.000,00
2.2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	256.691.000,00
2.2.4.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	137.703.000,00
2.3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.925.000,00
2.3.2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	113.803.000,00
2.3.3.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.975.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	27.750.000,00
2.4.1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.750.000,00
2.4.2.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	126.000.000,00
2.5.1.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	<u>1.245.502.250,00</u>
	SURPLUS / (DEFISIT)	<u>49.876.612,00</u>
3.	PEMBIAYAAN	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.974,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	<u>(49.853.026,00)</u>

NO	URAIAN	ANGGARAN
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	<u>23.586,00</u>

Sumber: Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2021

Dari Tabel 3 merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kampung Sri Sawahan tahun anggaran 2021 dan dapat kita lihat bahwa jumlah total pendapatan Kampung Sri Sawahan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp. 1.295.378.862,00**. Dan sama dengan tahun anggaran sebelumnya pembelanjaan terbesar terdapat pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu berjumlah **Rp. 590.063.250,00**.

2. Analisis Data

Tabel 4. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sri Sawahan Tahun Anggaran 2020 dan 2021

URAIAN	ANGGARAN 2020	ANGGARAN 2021
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	2.300.000,00	-
Pendapatan Transfer	1.277.909.705,00	1.295.378.862,00
JUMLAH	<u>1.280.209.705,00</u>	<u>1.295.378.862,00</u>
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	555.598.750,00	590.063.250,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	273.205.500,00	363.986.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	15.824.500,00	137.703.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.277.500,00	27.750.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	398.300.000,00	126.000.000,00
JUMLAH BELANJA	<u>1.246.206.250,00</u>	<u>1.245.502.250,00</u>
SURPLUS / (DEFISIT)	<u>34.003.455,00</u>	<u>49.876.612,00</u>
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	11.059.446,00	146.974,00
Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	<u>(33.940.554,00)</u>	<u>(49.853.026,00)</u>
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	<u>62.901,00</u>	<u>23.586,00</u>

Sumber: Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2020 dan 2021

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa anggaran belanja terbesar terdapat pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu pada tahun anggaran 2020 sebesar

Rp. 555.598.750,00 dan pada tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 590.063.250,00**. Dalam mengukur/menganalisis kinerja pengelolaan Dana Desa menggunakan beberapa rasio yaitu : Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah.

Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 5. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Desa Sri Sawahan Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Tahun anggaran	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
2020	2.300.000,00	1.277.909.705,00	0,17%
2022	0	1.295.378.862,00	0%

Sumber Data: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (diolah)

Dapat dilihat pada tabel 11 bahwa pada tahun 2020 rasio kemandirian daerah Desa Sri Sawahan yaitu sebesar 0,17% sedangkan pada tahun 2021 rasio kemandirian daerah Desa Sri Sawahan ialah 0%.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tabel6. Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah Desa Sri Sawahan Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Desa	Anggaran Belanja Desa	Rasio Efisiensi
2020	1.246.206.250,00	1.280.209.705,00	97,34%
2021	1.245.502.250,00	1.295.378.862,00	94,14%

Sumber Data: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (diolah)

Dapat dilihat pada tabel 12 bahwa pada tahun 2020 rasio efisiensi belanja daerah Desa Sri Sawahan yaitu sebesar 97,34% dan pada tahun 2021 rasio efisiensi belanja daerah Desa Sri Sawahan sebesar 94,14%.

B. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Daerah

Hasil Analisis penelitian bahwa rasio kemandirian daerah Desa Sri Sawahan pada tahun 2020 hanya sebesar 0,17% dan bahkan pada tahun 2021 rasio kemandirian daerah Desa Sri Sawahan adalah 0% yang berarti pada tahun tersebut Desa Sri Sawahan sangat bergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Sri Sawahan belum bisa menjadi desa yang mandiri karena rasio pada 2 tahun tersebut sangat lah rendah. Dan jika mengacu pada Depdagri, Kepmendagri No. 29 tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah maka Desa Sri Sawahan masuk ke dalam pola hubungan Instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.

2. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Hasil analisis penelitian bahwa rasio efisiensi belanja daerah Desa Sri Sawahan pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 97,34% dan pada tahun 2021 sebesar 94,14%. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan Pemerintah Desa Sri Sawahan kurang efisiensi. Kinerja keuangan Desa Sri Sawahan pada tahun 2020 – 2021 yang kurang efisien disebabkan adanya pemborosan pada saat memperhitungkan alokasi keuangan untuk biaya pembangunan dan aktivitas pemerintah desa dan kurang teliti dalam menghitung kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pendanaan tidak tepat sasaran dan kurang maksimal. Pemerintah Desa Sri Sawahan harus meningkatkan kinerja dengan memperhitungkan alokasi keuangan

secara cermat agar tidak menimbulkan keborosan dan kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari Analisis Laporan Keuangan Dana Desa di Kampung Sri Sawahan Kecamatan Punggur, maka disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio kemandirian daerah, kinerja keuangan Pemerintah Kampung Sri Sawahan Kecamatan Punggur pada tahun 2020 dan 2021 termasuk dalam kategori sangat rendah dan termasuk ke dalam pola hubungan hubungan Instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efesiensi belanja daerah, kinerja keuangan Pemerintah Kampung Sri Sawahan Kecamatan Punggur pada tahun 2020 dan 2021 didapatkan hasil yaitu kurang efesiensi.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliano, B. (2022, september 28). *KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/230628878/kpk-sebut-korupsi-dana-desa-masuk-3-kasus-terbanyak-dalam-korupsi?page=all#page2>.

Bungin, Burhan, 2007, “*Penelitian Kuantitatif*”, Prenada Meda Group, Jakarta.

Depdagri, Kepmendagri No. 29 tahun 2022 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Firmansyah, D. Japlani, A. Suwanto(2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari*. Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro.

Jayanti, O. S., & Febriyanto, F. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kelurahan Sumbersari). *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 2(3), 593-602.

Lala, G. (2019). *Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan*. Nias Selatan Teluk Dalam: Program Studi Manajemen Nias Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Hasil Revisi Dari PP No.43 Tahun 2014 Tantang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

RI, K. (2022, maret 13). *Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan RI:

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2928-executife-resume-penyaluran-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-ta-2021.html>.

Sugiyono. (2017). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta”*, Cv: Bandung.

Swastika, V. M. (2019, februari 22). *Dana Desa*. Diambil kembali dari Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/vanessams/5c70006eab12ae0af214741e/dana-desa>.

Triani, N. N. A., Handayani, S. (2018) *Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widiyanti, Arista. *“Akuntabilitas dan Transfaransi Pengelolaan Alokasi DanaDesa (StudiPada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi, Malang :UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Yuwono, T. P. 2022. Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>.